

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2022

Nabella Putri Islami¹, Sandrayati², Desi Indriasari³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, nabellaputri1818@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya, sandradewasaputra@gmail.com

³Politeknik Negeri Sriwijaya, uno1.adies2@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak Kompleksitas, Ukuran Pemerintah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Sumatera yang berjumlah 10 provinsi dengan periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan teknik penyampelan sensus atau sampling jenuh. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diolah melalui aplikasi (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kompleksitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, secara simultan Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal.

Kata Kunci: Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the impact of Complexity, Government Size and Follow-up of Audit Results on the Weakness of the Internal Control System. The population in this study is the Provincial Government in Sumatra which totals 10 provinces with the period 2018-2022. This study uses a census sampling technique or saturated sampling. The type of research is quantitative research, the data used is secondary data in the form of Regional Government Financial Statements and processed through the application (SPSS) version 26. The results of the study show that partially Complexity has a positive and significant effect on the Weakness of the Internal Control System, Government Size has a negative and significant effect on the Weakness of the Internal Control System, Follow-up of Audit Results has no effect on the Weakness of the Internal Control System, simultaneously Complexity, Government Size, and Follow-up of Audit Results have an effect on the Weakness of the Internal Control System.

Keywords : Complexity, Government Size, Follow-up of Audit Results, and Weaknesses of the Internal Control System.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini menganut sistem desentralisasi yang menunjukkan keyakinan Pemerintah Pusat bahwa pemerintah daerah mampu mengembangkan potensinya. Otonomi daerah mengharuskan pimpinan pemerintah daerah mengelola keuangan yang menjadi tanggung jawabnya secara adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurut situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, otonomi daerah selalu menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya kasus penipuan dan korupsi. Faktor utama terjadinya penipuan adalah lemahnya sistem



pengendalian internal pemerintah. Tidak adanya pengendalian internal yang efektif merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Setiap organisasi memerlukan pengendalian untuk mencegah penipuan.

Dalam banyak kasus, kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mencegah dan mencegah terjadinya kecurangan pada organisasi khususnya pemerintah daerah. Berdasarkan LHP 2018-2022, kerentanan SPIP berfluktuasi antar provinsi di Pulau Sumatera. Jumlah temuan kerentanan SPIP provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar Kelemahan SPIP Se-Sumatera
Sumber : LHP atas LKPD Tahun 2018-2022**

Berikut merupakan total data mengenai temuan kelemahan sistem pengendalian 10 Provinsi di Pulau Sumatera dalam lima tahun yaitu 2018-2020.

Total Temuan Kelemahan SPIP 10 Provinsi di Pulau Sumatera

2018	2019	2020	2021	2022
110	74	87	84	96

Sumber : LHP atas LKPD Tahun 2018-2022

Temuan kelemahan SPIP pada Pemerintah Provinsi di Sumatera pada tahun 2018 adalah sebanyak 110 kelemahan. Pada tahun 2019 ada sebanyak 74 kelemahan SPIP. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kelemahan SPIP mengalami penurunan sebanyak 36 temuan. Tahun 2020 ditemukan sebanyak 87 kelemahan SPIP. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka mengalami kenaikan sebanyak 13 temuan. Tahun 2021 ditemukan sebanyak 84 kelemahan, yang berarti mengalami penurunan sebanyak 3 temuan. Tahun 2022 ditemukan

sebanyak 96 kelemahan, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka, mengalami kenaikan sebanyak 12 temuan. Kasus kelemahan SPIP yang paling banyak terjadi pada pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 sebanyak 21 kasus.

Naik turunnya kelemahan sistem pengendalian internal dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini, variabel yang dapat dikaitkan dengan kelemahan sistem pengendalian internal adalah variabel Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Menurut Andesti & Agustin (2022), meningkatnya kompleksitas berarti pemerintah daerah memiliki lebih banyak jumlah dan variasi kegiatan yang harus dikelola, sehingga melemahkan pengendalian internal. Menurut Masnila et al., (2024), dengan bertambahnya jumlah penduduk di Pemerintah Provinsi yang merepresentasikan variabel Ukuran Pemerintah, maka semakin sedikit temuan kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah begitu pula sebaliknya. Menurut Fariid Miftah (2019), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK termasuk memantau dan memperbaiki kekurangan. Tidak adanya pelaksanaan tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi menunjukkan kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal ada yang meningkat, menurun, dan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa provinsi di Sumatera yang memiliki sistem pengendalian internal yang kurang baik.

B. KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* serta bagaimana SPIP dapat membantu mengurangi masalah keagenan. *Agency theory* terjadi karena adanya asimetri informasi antara agen (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dan prinsipal (masyarakat). Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mendapatkan mandat untuk mengelola anggaran dari rakyat sebagai prinsipal, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal suatu pemerintahan merupakan suatu proses berdasarkan peraturan dan prosedur yang dimaksudkan dan diikuti oleh pihak-pihak terkait untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pemerintah dan masyarakat guna menjamin tercapainya ambisi tertentu yang saling terkait. Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap efektivitas dan efisiensi tujuan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas

Kompleksitas adalah tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, seperti tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi, dan seberapa luas unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya, yaitu menerapkan pengendalian internal (Lenni, 2018).



Ukuran Pemerintah

Ukuran adalah dimensi atau ukuran yang menunjukkan besarnya suatu objek atau entitas. Dengan demikian, ukuran pemerintah daerah mengacu pada evaluasi besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah (Misnar et al., 2023).

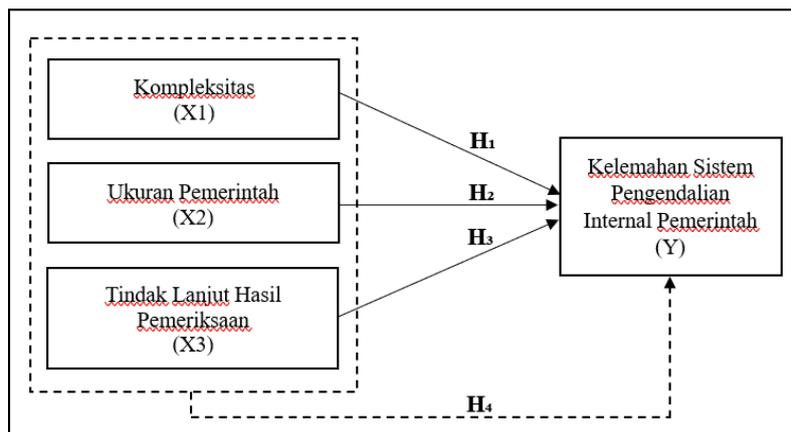
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah langkah-langkah atau keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas yang diperiksa atau pihak lain yang berwenang untuk menjalankan rekomendasi dari hasil pemeriksaan, faktor yang dikaitkan dengan tindakan yang diambil setelah pemeriksaan sistem pengendalian internal (Fariid Miftah, 2019).

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), dalam Fariid Miftah (2019), kelemahan dalam sistem pengendalian internal adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kondisi material salah saji pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dihindari atau terdeteksi.

Kerangka Pemikiran



Gambar Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

- H₁: Kompleksitas berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Provinsi di Sumatera
- H₂: Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Provinsi di Sumatera
- H₃: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Provinsi di Sumatera
- H₄: KP, UP, TLHP berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Provinsi di Sumatera

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel independennya adalah Kompleksitas (X₁), Ukuran Pemerintahan (X₂) dan Tindak Lanjut Hasil Audit (X₃) dan variabel dependen dalam penelitian ini

adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y). Dilakukan pada 10 Pemerintah Provinsi di Sumatera periode 2018-2022. Penulis memilih Provinsi Sumatera karena hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018-2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan banyak masalah kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Kompleksitas diartikan sebagai berbagai faktor dengan karakteristik berbeda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung dan tidak langsung (Misnar et al., 2023). Jumlah SKPD tiap Provinsi digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Ukuran Pemerintah merupakan sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah. Ukuran Pemerintah Daerah tercermin dari jumlah penduduknya, yang mencerminkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah guna memenuhi kebutuhan masing-masing (Simanjuntak, 2016). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah kegiatan atau keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas yang diperiksa atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan rekomendasi hasil pemeriksaan, faktor yang dikaitkan dengan tindakan yang diambil setelah pemeriksaan sistem pengendalian internal (Fariid Miftah, 2019). Kelemahan Sistem Pengendalian Internal merupakan kelemahan yang signifikan dengan dampak yang jauh dari kondisi material salah saji pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat diantisipasi atau terdeteksi (Fariid Miftah, 2019).

Ukuran sampel dalam penelitian ini mencakup 10 Provinsi di Sumatera, yang jangka waktu 5 tahun anggaran (2018-2022) sehingga total sampel yang diperoleh sebanyak 50 unit pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Dokumentasi dari sumber sekunder melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Jumlah penduduk didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data hasil pemeriksaan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didapat dari situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26 untuk Windows. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas). Selain itu penelitian ini juga mencakup beberapa uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F) serta uji koefisien determinasi (R²).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kelemahan_SPI	50	2	21	9.07	2.591
Kompleksitas	50	27	51	40.20	6.302
UP	50	1455678	15115206	5901787.34	3886499.221
TLHP	50	.16	.95	.5408	.22893
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024



Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y) memiliki nilai minimum sebesar 2 temuan dari Provinsi Kepulauan Riau dan nilai maksimum sebesar 21 temuan dari Provinsi Riau, dengan nilai rata-rata selama 5 tahun periode 2018-2022 sebesar 9,07 temuan dan standar deviasi 2,591. Kompleksitas (X₁) memiliki nilai minimum sebesar 27 SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan nilai maksimum sebesar 51 SKPD di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai rata-rata jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 tahun periode 2018-2022 sebesar 40,20 SKPD dan standar deviasi 6,302. Ukuran Pemerintah (X₂) memiliki nilai minimum sebesar 1.455.678 penduduk yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan nilai maksimum sebesar 15.115.206 penduduk terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai rata-rata jumlah penduduk selama 5 tahun periode 2018-2022 sebesar 5901787,34 penduduk dan standar deviasi 3886499,221. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X₃) memiliki nilai minimum sebesar 0,16 temuan, dan nilai Maksimum sebesar 0,95 temuan, dengan nilai rata-rata tindak lanjut hasil pemeriksaan selama 5 tahun periode 2018-2022 sebesar 0,5408 temuan dan standar deviasi 0,22893.

Tabel Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.33848371
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.096
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,088 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024

Hasil dari Asymp. Sig. (2-tailed) jika nilai signifikansi dari distribusi normal adalah 0,088 dimana lebih besar (>) 0,05, ini mengindikasikan bahwa data tersebut dapat dianggap memiliki distribusi normal.

Tabel Hasil Uji Multikoloneritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompleksitas	.544	1.838
	UP	.520	1.924
	TLHP	.938	1.066

a. Dependent Variable: Kelemahan_SPI

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024

Nilai tolerance untuk Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menunjukkan $\geq 0,10$ dan VIF untuk nilai Kompleksitas, Ukuran

Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menunjukkan ≤ 10 , bahwa tidak ada multikolinieritas dalam variabel tersebut.

Tabel Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.431 ^a	.186	.133	2.414	1.872

a. Predictors: (Constant), TLHP, Kompleksitas, UP

b. Dependent Variable: Kelemahan_SPI

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024

Hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai DW sebesar 1,872. Untuk menafsirkannya nilai DW akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson (dU) pada nilai signifikansi 0,05, jumlah pengamatan sampel 50 (n) dan jumlah variabel 3 (k=3) yaitu sebesar 1,673. Nilai Durbin-Watson tersebut berada diantara nilai dU dan 4-dU ($dU < DW < 4-dU$) nilai 4-dU yaitu $4-1,673 = 2,327$ ($1,673 < 1,872 < 2,327$). Hal ini berarti tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.210	1.914		-.632	.530
	Kompleksitas	.061	.052	.224	1.170	.248
	UP	-1.154E-7	.000	-.261	-1.333	.189
	TLHP	1.857	1.095	.247	1.697	.096

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024

Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan memiliki signifikansi yang menunjukkan angka ($> 0,05$) dari hasil tersebut maka variabel dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.023	14.332		.560	.578
	Kompleksitas	.107	.128	.177	.837	.407
	UP	-.205	1.151	-.038	-.178	.859
	TLHP	-.285	2.458	-.017	-.116	.908

a. Dependent Variable: Kelemahan_SPI

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024



$$Y_{kspip} = 8.023 + 0.107Kompeksitas - 0,205UP - 0,285TLHP + e$$

Nilai Konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 8,023, menyatakan bahwa apabila nilai variabel Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak mengalami perubahan atau konstan, maka variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Per Pemerintah Provinsi di Sumatera adalah sebesar 8,023. Koefisien variabel Kompleksitas adalah 0,107, yang menunjukkan bahwa jika Kompleksitas meningkat sebesar 0,107, maka Kelemahan Sistem Pengendalian Internal akan meningkat sebesar 0,107. Koefisien variabel Ukuran Pemerintah adalah -0,205, artinya jika Ukuran Pemerintah meningkat, maka Kelemahan Sistem Pengendalian Internal akan menurun sebesar 0,205. Koefisien variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah -0,285, artinya jika Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan meningkat, maka Kelemahan Sistem Pengendalian Internal juga akan menurun sebesar 0,285.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.431 ^a	.186	.133	2.414

a. Predictors: (Constant), TLHP, Kompleksitas, UP

b. Dependent Variable: Kelemahan_SPI

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024

Hasil uji koefisien determinasi dilihat dari nilai (*Adjusted R Square*) adalah 0,133 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dapat dijelaskan oleh Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi di Sumatera hanya sebesar 13,3% sisanya sebesar 86,7% ($100\% - 13,3\% = 86,7\%$) dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	.723	2.719		.266	.792			
Kompleksitas	.239	.074	.582	3.226	.002	.304	.429	.429
UP	-2.826E-7	.000	-.424	-2.297	.026	-.016	-.321	-.306
TLHP	.730	1.555	.065	.470	.641	.030	.069	.062

a. Dependent Variable: Kelemahan_SPI

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024

Variabel Kompleksitas memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,226 > 2,013$) dan nilai signifikansi lebih kecil ($0,002 < 0,05$), hipotesis pertama (H_1) **diterima**. Variabel Ukuran Pemerintah memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($-2,297 > 2,013$) dan nilai signifikansi lebih kecil ($0,026 < 0,05$), hipotesis kedua (H_2) **diterima**. Variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0,470 < 2,014$) dan nilai signifikansi lebih besar ($0,641 > 0,05$), hipotesis ketiga (H_3) **ditolak**.

**Tabel Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.104	3	20.368	3.497	.023 ^b
	Residual	267.957	46	5.825		
	Total	329.061	49			

a. Dependent Variable: Kelemahan_SPI

b. Predictors: (Constant), TLHP, Kompleksitas, UP

Sumber : Data diolah SPSS Versi 26, 2024

Nilai F_{hitung} adalah 3,497 melebihi dari nilai F_{tabel} sebesar 3,200 ($3,497 > 3,200$) dan nilai signifikansinya kurang dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,023 < 0,05$), hipotesis keempat (H_4) **diterima**.

Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t_{hitung} untuk variabel Kompleksitas adalah 13,226. Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,226 > 2,013$), dengan nilai signifikansi variabel Kompleksitas sebesar 0,002, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompleksitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kelemahan. Besar pengaruh secara parsial variabel Kompleksitas adalah sebesar 0,177, variabel ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Kelemahan SPI. Penelitian ini sejalan dengan Adha (2019) yang menunjukkan dimana Kompleksitas mempengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal secara positif dan signifikan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kenaikan Kompleksitas akan meningkatkan temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera secara proporsional. Semakin tinggi kompleksitas suatu daerah, yang ditandai dengan jumlah SKPD yang banyak, akan menyebabkan peningkatan temuan kelemahan sistem pengendalian internal di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t_{hitung} untuk Ukuran Pemerintah adalah sebesar -2,297. Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,297 > 2,013$), dan nilai signifikansi variabel Ukuran Pemerintah adalah 0,026, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera. Besar pengaruh secara parsial variabel Ukuran Pemerintah adalah sebesar 0,007. Hal ini sejalan yang dilakukan Masnila (2024) yang menunjukkan dimana Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada Pemerintah Provinsi yang merupakan representasi dari variabel Ukuran Pemerintah, maka jumlah temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal akan semakin berkurang.



Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t_{hitung} untuk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah 0,470. Nilai ini lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0,470 < 2,013$), dan nilai signifikasinya 0,641 yang lebih tinggi dari tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera. Besar pengaruh secara parsial variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah sebesar 0,002, variabel ini memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap Kelemahan SPI. Penelitian ini sejalan dengan temuan dari Fariid Miftah (2019) yang menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut dapat menyebabkan peningkatan temuan yang menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji F), pengaruh Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 3,497 lebih besar dari F_{tabel} ($3,497 > 3,200$). Nilai signifikansi dibawah tingkat 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,023. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut, secara simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera. Selanjutnya, dari analisis hubungan antara variabel dependen dan independen, atau untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen, koefisien determinasi adalah 0,133. Hal ini berarti bahwa apabila variabel Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mengalami kenaikan, maka Kelemahan Sistem Pengendalian Internal mengalami penurunan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara parsial, kompleksitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dimana semakin tinggi kompleksitas suatu daerah, yang ditandai dengan banyaknya jumlah SKPD, akan meningkatkan temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera. Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dimana semakin tinggi jumlah penduduk, akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera, di mana rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut menyebabkan peningkatan temuan Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal pemerintah daerah. Secara simultan, Kompleksitas, Ukuran Pemerintah, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih luas tidak hanya Provinsi di Sumatera, mungkin mencakup Provinsi di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 38 provinsi. Selain itu, karena koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya 13,3%, menunjukkan bahwa masih banyak variabel independen lain yang

berpotensi mempengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan atau menambahkan variabel independen lain sebagai faktor yang mungkin memengaruhi Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian atau variasi wilayah penelitian, seperti menggunakan sampel yang berbeda, meliputi periode waktu yang lebih luas atau menggunakan cara pengukuran variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A., A. N., P. A.,. (2019). Pengaruh Ukuran Entitas dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. *SIKAP*, Vol. 2.
- Andesti, M., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *In Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 4, Issue 1). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018.
- _____ (2020) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019.
- _____ (2021) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020.
- _____ (2022) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021.
- _____ (2023) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022.
- Farid Miftah. (2019). Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan.
- Misnar, R. T., Maria, M., & Aryani, Y. A. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 492-500.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Sari Lenni Mustika Sari. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2015). *JOM Fekon* (Vol.1 E.d.1).
- Ulfa, F. S., Masnila, N., & Aryani, Y. A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Di Sumatera Tahun 2017-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 134-155.

